

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan proses pendidikan yang dirancang secara sistematis untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia melalui penguasaan pengetahuan, penghayatan nilai, serta keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kansil (1994:84), “Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.”

Sejalan dengan itu, Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) menjelaskan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.” Secara yuridis, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Depdiknas (2006:49) juga menegaskan bahwa pembelajaran PKn bertujuan untuk membekali peserta didik agar berpikir kritis, rasional, kreatif, berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak sadar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembelajaran PKn tidak hanya berorientasi pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis, toleran, dan peduli terhadap bangsa dan negaranya.

Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis dan terencana untuk membentuk kepribadian peserta didik melalui penanaman nilai-nilai moral, etika, dan budaya bangsa. Salah satu tokoh penting dalam pendidikan karakter adalah Thomas Lickona (1991), yang menyatakan bahwa pendidikan karakter melibatkan tiga komponen utama, yaitu *moral knowing* (pengetahuan moral), *moral feeling* (perasaan moral), dan *moral action* (tindakan moral). Ketiga aspek ini harus dikembangkan secara terpadu agar peserta didik tidak hanya mengetahui nilai-nilai seperti toleransi, tetapi juga merasakannya dan menerapkannya dalam tindakan sehari-hari.

Menurut Koesoema A. Doni (2007), pendidikan karakter merupakan proses internalisasi nilai-nilai moral yang diwujudkan dalam perilaku nyata. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter tidak hanya menyangkut ranah

kognitif, tetapi juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PKn, siswa perlu dilibatkan dalam aktivitas yang mendorong mereka untuk memahami, merasakan, dan menjalankan nilai-nilai seperti toleransi, kebersamaan, dan keadilan dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam tataran teori.

Selain itu, pendidikan karakter juga dipandang sebagai bagian dari pendidikan nilai (*value education*), seperti yang dijelaskan oleh Jacques Maritain, seorang filsuf pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan karakter harus membentuk kesadaran moral peserta didik agar mampu memilih dan bertindak berdasarkan nilai yang baik. Dalam pembelajaran PKn, pendekatan ini mendorong siswa untuk mampu mengambil keputusan moral secara mandiri, misalnya dalam menyikapi perbedaan agama atau budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Budimansyah dan Suryadi (2008) menyatakan bahwa pendidikan karakter di Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, seperti gotong royong, religiusitas, kekeluargaan, dan musyawarah. Nilai-nilai ini telah menjadi identitas bangsa Indonesia dan sangat relevan untuk diinternalisasikan melalui pembelajaran PKn. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep toleransi sebagai teori, tetapi juga menghayatinya sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Salah satu teori yang sangat relevan dalam pendidikan karakter adalah teori sosial kognitif Albert Bandura. Bandura menekankan pentingnya pembelajaran sosial melalui observasi, imitasi, dan modeling. Dalam

pembelajaran PKn, guru dan lingkungan sekolah berperan sebagai model utama yang akan ditiru oleh siswa. Ketika guru menunjukkan sikap menghargai perbedaan dan bersikap adil kepada semua siswa tanpa memandang agama atau latar belakangnya, maka siswa secara tidak langsung belajar untuk bersikap toleran dan inklusif.

Selanjutnya, Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang menjelaskan bahwa perkembangan karakter seseorang terjadi melalui beberapa tahap. Tahap tertinggi dari perkembangan moral menurut Kohlberg adalah tahap pasca-konvensional, di mana seseorang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. Dalam pembelajaran PKn, siswa perlu dibimbing agar tidak hanya menaati aturan karena takut dihukum, tetapi karena kesadaran moral yang tumbuh dari dalam diri, termasuk dalam hal menghormati keberagaman agama.

Kurikulum 2013 secara eksplisit mencantumkan penguatan pendidikan karakter sebagai bagian dari kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017), terdapat lima nilai utama karakter yang harus dibangun melalui pendidikan, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pembelajaran PKn memiliki peran sentral dalam penguatan kelima nilai tersebut karena memuat materi yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial, kewarganegaraan, dan keberagaman dalam masyarakat.

David Elkind dan Freddy Sweet (2004) menyatakan bahwa pendidikan karakter akan berhasil jika seluruh komunitas sekolah terlibat dalam membentuk budaya positif. Hal ini berarti pembelajaran PKn tidak dapat berjalan efektif secara terpisah dari nilai-nilai yang ditanamkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Kegiatan pembiasaan, kerja sama lintas agama, serta keterlibatan dalam proyek sosial dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menanamkan toleransi beragama secara nyata dan kontekstual.

Dalam perspektif global, UNESCO (1996) menekankan empat pilar utama pendidikan, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. Pilar “learning to live together” sangat penting dalam pendidikan karakter dan pembelajaran PKn karena mendorong peserta didik untuk hidup bersama dalam keberagaman, menghargai perbedaan, dan menjalin kerja sama lintas budaya dan agama. Pendidikan karakter melalui PKn harus mengembangkan kemampuan ini agar siswa siap menghadapi tantangan globalisasi dan pluralitas sosial.

Akhirnya, Sutrisno (2009) menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam mengajarkan pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti toleransi harus dikaitkan dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi siswa sehari-hari. Guru PKn perlu mengangkat kasus-kasus nyata dalam masyarakat yang relevan dengan konteks siswa, seperti konflik antaragama, diskriminasi, atau kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menjadi hafalan konsep, tetapi menjadi proses pembentukan karakter yang hidup dan bermakna.

## **B. Strategi Pembelajaran Nilai Toleransi Dalam PKN**

Strategi pembelajaran memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi secara efektif di ruang kelas. Dalam pendidikan kewarganegaraan, toleransi perlu ditanamkan tidak hanya secara kognitif, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang mendorong siswa berpikir kritis dan reflektif. Seperti dinyatakan oleh Harahap (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, keberhasilan pembelajaran nilai-nilai sosial seperti toleransi sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang mampu menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa.

Pendekatan kontekstual menjadi salah satu strategi pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan sikap toleransi. Menurut Nurhadi (2021) dalam *Jurnal Civic Education*, pembelajaran kontekstual memberikan ruang bagi siswa untuk mengaitkan materi ajar dengan fenomena nyata, seperti keberagaman agama di lingkungan sekitar. Hal ini memungkinkan siswa memahami pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan dan menjadikan toleransi sebagai kebutuhan dalam kehidupan sosial.

Strategi *Problem-Based Learning (PBL)* juga sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran toleransi. Dalam PBL, siswa diajak menyelesaikan masalah sosial nyata yang menuntut kerja sama dan pemikiran terbuka. Lestari (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* mengungkapkan bahwa PBL dapat meningkatkan kesadaran sosial siswa dan memperkuat sikap menghargai perbedaan, terutama dalam konteks kebhinekaan agama dan budaya.

Lebih lanjut, implementasi PBL juga melatih siswa untuk berpikir kritis dan menyampaikan gagasan secara demokratis. Siswa tidak hanya diajak untuk memahami nilai-nilai, tetapi juga untuk menerapkannya dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Oktaviani dan Saputra (2023) dalam Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, model PBL memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir reflektif, empatik, dan partisipatif terhadap isu keberagaman.

Selain PBL, strategi pembelajaran kooperatif juga sangat efektif dalam membangun suasana kelas yang toleran. Metode seperti jigsaw dan think-pair-share memungkinkan interaksi intens antar siswa dari latar belakang berbeda. Hidayat (2020) dalam Jurnal Pendidik menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif membantu siswa untuk belajar menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dalam kelompok heterogen, dan membangun komunikasi yang inklusif.

Dalam konteks keberagaman agama, pembelajaran kooperatif mampu menjadi jembatan untuk mengurangi prasangka. Ketika siswa bekerja dalam kelompok dengan anggota yang berbeda agama atau etnis, mereka akan belajar secara langsung bagaimana pentingnya toleransi dalam kerja sama. Rahayu & Amiruddin (2021) dalam Jurnal Pendidikan Multikultural menegaskan bahwa interaksi lintas budaya dalam kelas menjadi sarana efektif menumbuhkan kesadaran toleransi sejak dini.

Di era digital saat ini, guru juga harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran nilai. Penggunaan media seperti video edukatif,

forum diskusi daring, atau infografis interaktif menjadi strategi yang menarik minat siswa. Santoso dan Wulandari (2023) dalam *Jurnal Civic and Social Studies* menyatakan bahwa integrasi media digital dalam pembelajaran PKn tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga memperluas wawasan siswa terhadap praktik toleransi di berbagai konteks budaya dan agama.

Teknologi juga memungkinkan siswa mengeksplorasi pengalaman keberagaman di luar lingkungannya sendiri. Dengan media digital, siswa dapat belajar dari kasus nyata, mendengarkan cerita inspiratif, atau bahkan berinteraksi dengan siswa dari latar belakang budaya berbeda. Suryani dan Ahmad (2024) dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan* menyebutkan bahwa penggunaan teknologi mendorong keterlibatan siswa secara lebih aktif dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan toleransi.

Pembelajaran reflektif menjadi strategi yang tidak kalah penting dalam menanamkan nilai toleransi. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk menulis pengalaman pribadi, berdiskusi tentang kasus nyata, atau melakukan debat etika yang menyentuh isu keberagaman. Priyono (2024) dalam *Jurnal Humaniora Pendidikan* mengungkapkan bahwa refleksi mampu menyentuh dimensi emosional siswa dan memperkuat kesadaran terhadap pentingnya menghargai perbedaan.

Melalui refleksi, siswa tidak hanya diajak untuk memahami toleransi sebagai konsep abstrak, melainkan mengaitkannya dengan pengalaman sehari-hari. Mereka merefleksikan sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan teman yang berbeda agama, etnis, atau budaya. Menurut Fauziah dan

Hamid (2025) dalam Jurnal Psikologi Pendidikan, refleksi nilai menjadi strategi yang efektif untuk membentuk kepribadian toleran karena menyentuh sisi moral dan sosial peserta didik secara mendalam.

### **C. Hakekat dan Ruang Lingkup PKN**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang strategis dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berkarakter. Hakikat PKn adalah sebagai wahana pendidikan nilai dan moral yang menanamkan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. PKn tak hanya memuat aspek kognitif mengenai sistem pemerintahan, konstitusi, dan hukum nasional, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik melalui penanaman nilai-nilai seperti nasionalisme, toleransi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan temuan Parawangsa, Dewi & Furnamasari (2021) yang menyatakan bahwa PKn sebagai pendidikan moral dan nilai di sekolah dasar berfokus pada membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Somantri (2001), PKn merupakan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Selaras dengan hal itu, Hasibuan dkk. (2023) menegaskan bahwa dalam era globalisasi, PKn harus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi negara dalam semua aspek pembelajaran kewarganegaraan. Hakikat PKn bersifat multidisipliner, memadukan aspek politik, hukum, sosial, budaya,

dan moral, sehingga menciptakan kerangka pembelajaran yang utuh guna membentuk warga negara yang sadar konstitusi, cinta tanah air, serta aktif dalam kehidupan demokratis.

Ruang lingkup PKn meliputi tiga dimensi utama yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Civic knowledge mencakup pemahaman mengenai sistem pemerintahan, lembaga negara, konstitusi, hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Civic skills berbicara tentang kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, menyelesaikan konflik secara damai, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Sedangkan civic disposition mencakup sikap seperti cinta tanah air, toleransi, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Selain itu, ruang lingkup PKn juga mencakup penguatan nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya, serta pengembangan sikap inklusif dalam kehidupan sosial. Sebagaimana Qizwini dkk. (2023) temukan dalam kajiannya bahwa desain kurikulum PPKn berbasis tematik memperkuat pemahaman kewarganegaraan siswa, meskipun pelaksanaannya menghadapi tantangan yang perlu penguatan lebih lanjut, termasuk integrasi nilai toleransi antarumat beragama dalam praktik pembelajaran yang kontekstual.

Lebih dari itu, PKn juga berkembang mengikuti tantangan global. Urgensi pendidikan kewarganegaraan global sebagai bagian dari kurikulum abad ke-21 sangat penting untuk membekali siswa menjadi warga dunia (*global citizen*) yang menghargai keberagaman, perdamaian, dan keadilan sosial

universal. Hal ini ditegaskan dalam studi Yusof dkk. (2022) bahwa pendidikan kewarganegaraan global harus diintegrasikan secara aksiologis dalam PPKn untuk menyikapi isu global yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Selanjutnya, Fajar dan Martini (2024) menyatakan bahwa pembelajaran PKn belum sepenuhnya berfungsi membangun karakter budaya bangsa secara menyeluruh, khususnya dalam aspek berpikir kreatif, rasional, dan partisipatif. Meskipun demikian, nilai-nilai luhur bangsa seperti Pancasila telah menjadi ciri khas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang berperan dalam membentuk identitas dan karakter nasional.

Istianah (2024) menambahkan bahwa pendidikan kearifan lokal dalam pembelajaran PKn dapat menjadi sarana untuk memperkuat harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai integrasi nilai lokal dengan nilai kebangsaan, yang secara langsung mendukung pengembangan sikap toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman agama dan budaya.

Dengan demikian, PKn sebagai program pendidikan memiliki dua pilar utama: menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi dinamika global. Ruang lingkupnya mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang berorientasi pada demokrasi, HAM, toleransi, dan kesadaran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab baik di tingkat nasional maupun global.

#### **D. Peran Media dan Teknologi dalam Pembelajaran Toleransi**

Media dan teknologi digital membuka peluang besar dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap nilai toleransi. Teori *social learning* dari Bandura menjelaskan bahwa individu belajar banyak melalui pengamatan, peniruan, dan modeling. Oleh karena itu, video edukatif yang menampilkan perilaku toleran, tokoh lintas agama, serta kisah sukses hidup harmonis dalam keberagaman dapat berfungsi sebagai model yang membentuk sikap siswa. Penelitian dari Hasanah & Nurlaila (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Sosial* menemukan bahwa penggunaan film dokumenter berbasis nilai-nilai kebhinekaan secara signifikan meningkatkan empati dan kesadaran siswa terhadap keberagaman sosial.

Teknologi virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) kini juga mulai digunakan dalam pembelajaran karakter, termasuk toleransi. Dengan simulasi realitas sosial yang imersif, siswa bisa diajak mengalami langsung situasi konflik antar kelompok dan mencari solusi damai secara virtual. Teori *experiential learning* dari Kolb menegaskan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi melalui pengalaman langsung yang kemudian direfleksikan. Dalam konteks ini, penggunaan VR memberikan pengalaman sosial yang dalam, yang kemudian memperkuat sikap toleran siswa (Rahmadani & Suryani, 2021, *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*).

Tidak kalah pentingnya, strategi *flipped classroom* juga memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran toleransi. Dalam model ini, siswa

mengakses materi terlebih dahulu di rumah (melalui video, artikel, atau infografis), lalu di kelas berdiskusi dan merefleksikan materi secara kritis. Flipped classroom memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan opini secara mandiri sebelum berdiskusi secara terbuka. Studi oleh Pradana & Lestari (2023) dalam *Jurnal Pendidikan Interaktif* menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mendorong kesadaran nilai karena siswa lebih aktif dalam proses berpikir kritis dan argumentatif terhadap isu keberagaman.

Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning/PjBL) dengan dukungan media digital juga sangat potensial untuk diterapkan dalam konteks toleransi. Misalnya, siswa diminta membuat video kampanye toleransi, podcast reflektif, atau proyek media sosial bertema keberagaman. Menurut Dewantara & Siregar (2021) dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, kegiatan seperti ini membangun kepedulian sosial sekaligus mengasah keterampilan digital siswa secara produktif dan bermakna.

Selanjutnya, pendekatan *critical media literacy* sangat penting dalam mengajarkan siswa agar tidak sekadar menjadi pengguna media, tetapi juga menjadi pembaca kritis terhadap konten-konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian atau intoleransi. Menurut Al-Munawaroh (2020) dalam *Jurnal Literasi Digital dan Kewarganegaraan*, siswa yang dibekali dengan kemampuan membaca media secara kritis lebih mampu menangkal hoaks dan narasi intoleran, serta lebih sadar akan pentingnya menyaring informasi yang mereka konsumsi setiap hari.

Pembelajaran toleransi dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube kini juga berkembang sebagai bagian dari *student-centered learning*. Ketika siswa diberi ruang untuk membuat konten positif yang mempromosikan persaudaraan dan anti-diskriminasi, mereka tidak hanya menjadi pelajar tetapi juga agen perubahan. Ini sejalan dengan teori *participatory culture* dari Jenkins (2022), yang menyebutkan bahwa pelibatan aktif generasi muda dalam media digital mendorong munculnya keterlibatan sipil yang inklusif dan bermakna dalam kehidupan demokratis.

Guru juga memiliki peran penting sebagai fasilitator dan kurator konten digital. Mereka harus mampu memilih dan menyesuaikan media yang tidak hanya menarik, tetapi juga sarat nilai edukatif. Studi oleh Syafitri & Gunawan (2024) dalam *Jurnal Kependidikan Humanis* menyatakan bahwa guru yang aktif menyaring dan mengarahkan media pembelajaran memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap toleran siswa, terutama dalam mencegah paparan konten ekstremis.

Penting pula menanamkan nilai toleransi melalui literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum. Literasi ini mencakup pemahaman tentang hak digital, etika berkomunikasi daring, serta kesadaran sosial dalam ruang virtual. Menurut Rachmawati & Subagyo (2023) dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, siswa yang dibekali dengan etika digital menunjukkan tingkat empati dan toleransi yang lebih tinggi dalam interaksi daring maupun luring.

Dalam konteks pendidikan multikultural, penggunaan teknologi pendidikan perlu didesain tidak hanya informatif tetapi juga transformatif.

Pendidikan PKn harus menjadikan media sebagai alat untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keberagaman. Seperti ditegaskan oleh Mahfud (2022) dalam *Jurnal Multikultural dan Kewarganegaraan*, teknologi harus dimaknai sebagai ruang baru untuk menumbuhkan kesetaraan, bukan sebagai alat yang memperkuat polarisasi.

Akhirnya, integrasi media digital dalam pembelajaran toleransi memerlukan dukungan kebijakan sekolah yang adaptif dan inklusif. Infrastruktur digital, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum berbasis nilai harus menjadi prioritas. Seperti diungkapkan oleh Sutrisno & Hamid (2020) dalam *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, keberhasilan pendidikan nilai berbasis teknologi sangat bergantung pada sinergi antara guru, kurikulum, dan kebijakan institusi pendidikan yang progresif.

### 1. Pengertian Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga terjadi proses belajar yang efektif. Menurut Arsyad (2022), media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar untuk memperjelas pesan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Media tidak hanya berfungsi sebagai penunjang dalam proses transfer ilmu, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya serap dan daya ingat peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dalam konteks pembelajaran modern, media pembelajaran berkembang dari

media konvensional seperti papan tulis dan gambar ke media digital interaktif yang lebih menarik dan kontekstual. Penelitian oleh Ramadhani & Dewi (2021) dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran* menegaskan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi mampu meningkatkan partisipasi siswa, mengurangi kejenuhan belajar, serta memperkuat pemahaman konsep. Mereka menyatakan bahwa "media yang dikembangkan dengan menggabungkan elemen visual, audio, dan interaktivitas cenderung lebih efektif dalam menyampaikan pesan pendidikan, terutama dalam menanamkan nilai-nilai karakter seperti toleransi dan kerja sama." Oleh karena itu, media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari strategi pembelajaran yang efektif, terutama dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada pemahaman nilai-nilai sosial dan kebangsaan.

## 2. Pengertian Teknologi Pembelajaran

Teknologi pembelajaran adalah proses yang sistematis dalam merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi sumber serta proses untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Teknologi pembelajaran tidak hanya terbatas pada alat atau perangkat keras seperti komputer dan proyektor, tetapi mencakup seluruh pendekatan dan strategi yang didukung teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Munir (2021) dalam *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, teknologi pembelajaran adalah penerapan sistematis dari teori belajar dan teori pengajaran untuk mengembangkan dan mengelola proses serta

sumber belajar. Dengan kata lain, teknologi pembelajaran berperan sebagai penghubung antara teori pendidikan dan praktik pembelajaran melalui penggunaan teknologi.

Dalam konteks pembelajaran abad ke-21, teknologi pembelajaran menjadi sangat penting karena dapat mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan individual siswa. Iskandar dan Wahyuni (2022) dalam *Jurnal Teknologi dan Media Pendidikan* menyatakan bahwa teknologi pembelajaran berfungsi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel, adaptif, dan mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Mereka menambahkan bahwa “penerapan teknologi pembelajaran yang tepat dapat mendorong siswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan terlibat secara aktif dalam proses belajar.” Oleh karena itu, dalam pembelajaran nilai-nilai toleransi seperti dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), teknologi pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk menciptakan simulasi, media visual, dan diskusi daring yang memperkuat pemahaman siswa terhadap keberagaman dan hidup bersama secara damai.

### 3. Macam-Macam Media Pembelajaran

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Media tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga menjadi jembatan antara materi abstrak dengan pengalaman konkret siswa.

Terdapat berbagai macam media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, dan masing-masing memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang diajarkan. Menurut Riyana dan Susilana (2020) dalam *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran Inovatif*, media pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual.

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan siswa. Contohnya adalah gambar, grafik, diagram, poster, peta, dan model tiga dimensi. Media ini sangat efektif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak dan memperkuat daya ingat siswa terhadap informasi yang disampaikan secara visual. Media audio, seperti rekaman suara, radio pendidikan, atau podcast, digunakan untuk melatih keterampilan menyimak dan memahami informasi verbal. Media ini sangat berguna dalam pelajaran yang memerlukan penguatan aspek auditori, seperti memahami pidato kenegaraan atau wawancara tentang keberagaman sosial.

Sementara itu, media audiovisual merupakan kombinasi dari media audio dan visual, seperti video pembelajaran, film dokumenter, atau animasi interaktif. Media jenis ini sangat efektif dalam menyampaikan materi yang kompleks karena menggabungkan suara dan gambar dalam satu kesatuan pesan yang utuh. Seperti dijelaskan oleh Putra & Oktaviani (2021) dalam *Jurnal Pendidikan Multikultural*, “media audiovisual

sangat membantu siswa dalam memahami nilai-nilai abstrak seperti toleransi, karena dapat menampilkan situasi nyata kehidupan masyarakat yang plural dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami.”

Selain itu, berkembang pula media berbasis teknologi digital yang kini semakin banyak digunakan, seperti aplikasi pembelajaran interaktif, e-learning, simulasi virtual, dan media sosial edukatif. Media ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, individual, dan kontekstual. Misalnya, guru dapat menggunakan platform seperti Canva untuk membuat infografis toleransi, atau YouTube untuk menampilkan video pendek tentang keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Menurut Wulandari & Sari (2023) dalam *Jurnal Inovasi Media Pendidikan*, media digital telah “menggeser paradigma pembelajaran konvensional menjadi lebih dinamis dan berbasis partisipasi aktif siswa.”

Dengan demikian, pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat penting dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran. Guru harus mampu menyesuaikan media yang digunakan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks materi. Kombinasi antara berbagai jenis media baik tradisional maupun digital akan memperkaya pengalaman belajar siswa dan membantu menanamkan nilai-nilai seperti toleransi secara lebih menyeluruh dan bermakna.

#### **D. Lingkungan Belajar yang Mendukung**

Lingkungan sekolah yang inklusif merupakan bagian integral dari pembelajaran toleransi. Menurut Sulaiman (2021), pembelajaran yang

dilakukan di ruang kelas harus didukung oleh budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Sikap guru yang adil dan inklusif, interaksi antar siswa yang saling menghormati, serta kebijakan sekolah yang menolak diskriminasi adalah bagian dari pembelajaran tidak langsung (hidden curriculum) yang membentuk sikap siswa.

Penelitian oleh Sukmawati (2023) menegaskan bahwa sekolah yang secara konsisten menerapkan prinsip inklusi dan multikulturalisme mampu menumbuhkan toleransi yang kuat di kalangan siswa. Salah satu indikatornya adalah siswa tidak segan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang agama. Interaksi semacam ini menjadi pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman mereka terhadap pentingnya hidup rukun.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan karakter peserta didik. Sekolah yang menginternalisasi nilai-nilai inklusivitas akan mendorong siswa menjadi individu yang terbuka, empatik, dan berpikiran luas. Dalam perspektif teori pembelajaran sosial dari Bandura (1977), individu mempelajari perilaku sosial melalui observasi dan imitasi terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika lingkungan sekolah memperlihatkan nilai-nilai toleransi dan inklusi, siswa cenderung meniru dan menginternalisasi perilaku tersebut sebagai bagian dari kepribadian mereka. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan menghargai perbedaan bukan hanya penting untuk situasi saat ini, tetapi juga

berpengaruh terhadap pembentukan warga negara yang demokratis dan toleran di masa depan.

### **E. Evaluasi Pembelajaran Toleransi**

Evaluasi dalam pembelajaran toleransi harus mencerminkan pencapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak cukup hanya menguji pemahaman siswa secara tertulis, guru perlu melakukan penilaian berbasis observasi, portofolio, refleksi, serta penilaian sejawat. Menurut Surya (2021), "Evaluasi pembelajaran nilai harus menyentuh perilaku nyata siswa, seperti bagaimana mereka bersikap dalam interaksi lintas agama."

Guru PKn dapat mengembangkan instrumen penilaian sikap seperti jurnal reflektif harian, laporan kegiatan sosial, atau observasi perilaku di lingkungan sekolah. Penilaian ini memberikan gambaran sejauh mana nilai-nilai toleransi benar-benar tertanam dalam diri siswa. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran karakter yang menekankan pembentukan sikap melalui proses panjang dan konsisten.

Lebih jauh, dalam teori pembelajaran autentik (*authentic learning*), evaluasi pembelajaran nilai harus berbasis pada konteks nyata dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Evaluasi tidak semata bersifat normatif, tetapi bersifat formatif dan berkelanjutan, dengan tujuan memantau perkembangan karakter siswa secara menyeluruh. Seperti yang dikemukakan oleh Wiggins & McTighe (2005), evaluasi yang bermakna harus mencakup

tugas-tugas nyata yang menuntut siswa untuk menunjukkan pemahaman dan aplikasi dari nilai yang dipelajari.

Dengan demikian, guru PKn harus menilai tidak hanya apa yang siswa ketahui tentang toleransi, tetapi juga bagaimana mereka merasakan, mengekspresikan, dan mengamalkan toleransi dalam keseharian. Evaluasi yang efektif dalam konteks ini akan menjadi alat penting untuk mendeteksi kemajuan karakter siswa dan memperbaiki proses pembelajaran secara keseluruhan.

#### **F.Hasil Penelitian Relevan**

Dalam beberapa penelitian relevan yang dilakukan dalam lima tahun terakhir, terdapat temuan-temuan yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Rina Pratiwi (2020) mengungkapkan bahwa meskipun pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah mengenalkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa, penguatan terhadap sikap toleransi beragama masih terbatas pada pemahaman teoretis saja. Sebagian besar sekolah lebih fokus pada pendidikan kewarganegaraan secara umum, tanpa menekankan pada sikap toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Muara Rupit, di sisi lain, akan lebih terfokus pada konteks lokal dan akan mengidentifikasi bagaimana pendidikan PKn di sekolah tersebut diterapkan untuk membangun sikap toleransi beragama di kalangan siswa, dengan melihat interaksi langsung dan pengalaman antar siswa yang memiliki latar belakang agama yang berbeda.

Kedua, penelitian oleh Nabila Zahra (2021) menunjukkan bahwa meskipun kurikulum PKn telah memasukkan nilai-nilai toleransi beragama, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa sangat minim. Siswa cenderung tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengimplementasikan sikap toleransi dalam kehidupan sosial mereka, terutama dalam interaksi dengan teman sebaya yang beragama berbeda. Penelitian di SMA Negeri 1 Muara Rupit akan berbeda karena lebih menekankan pada interaksi langsung antar siswa dari agama yang berbeda, serta kegiatan konkret yang dilakukan sekolah untuk memperkuat pembelajaran toleransi beragama di luar ruang kelas.

Ketiga, penelitian oleh Arianto Setiawan (2022) menemukan bahwa meskipun pembelajaran PKn telah mencakup konsep toleransi beragama, banyak siswa yang masih menunjukkan sikap intoleran terhadap kelompok agama minoritas. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pembelajaran PKn yang bersifat umum tidak cukup efektif dalam membentuk sikap toleransi beragama di kalangan remaja. Penelitian di SMA Negeri 1 Muara Rupit, berbeda dengan penelitian ini, akan fokus pada bagaimana pengajaran PKn, bersama dengan kegiatan sekolah lainnya, dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi siswa untuk mengembangkan sikap toleransi beragama, dengan melihat peran aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan interaksi sehari-hari di sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2020) dalam jurnal "*Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Menanamkan Toleransi Beragama pada Siswa*" menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan

penting dalam membentuk toleransi beragama melalui materi keberagaman yang disampaikan sejak dini. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih banyak pada tingkat SMP, sementara penelitian ini berfokus pada siswa SMA yang memiliki dinamika sosial dan pemahaman yang lebih kompleks, menjadikan konteks pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan mereka yang sudah lebih terlibat dalam interaksi sosial. Penelitian oleh Azmi (2021) dalam jurnal *"Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter untuk Meningkatkan Toleransi Beragama"* menekankan pentingnya metode pengajaran berbasis karakter dan interaktif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa metode partisipatif dalam PKn efektif dalam meningkatkan sikap toleransi, namun perbedaannya terletak pada penerapan metode tersebut di SMA Negeri 1 Muara Rupit, yang memiliki konteks sosial dan budaya yang lebih kaya serta tantangan yang berbeda dalam pembentukan sikap toleransi.

Lestari (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *"Peran Lingkungan Sekolah dalam Pembentukan Toleransi Beragama Siswa"* menemukan bahwa lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman agama sangat mempengaruhi sikap toleransi siswa. Walaupun penelitian ini juga membahas peran lingkungan sekolah, penelitian ini membedakan karena lebih menekankan pada sekolah berbasis inklusi dan pluralisme, sedangkan penelitian ini mengkaji SMA Negeri 1 Muara Rupit, yang menghadapi tantangan berbeda dalam menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis meskipun dengan keberagaman agama yang ada. Penelitian oleh Yuliana (2023) dalam *"Tantangan Pembelajaran Toleransi Beragama di Sekolah:*

*Kendala Kurikulum dan Materi Ajar"* menunjukkan bahwa keterbatasan materi ajar dan kurikulum sering menjadi hambatan dalam mendalami nilai toleransi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sedang dibahas, namun penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana SMA Negeri 1 Muara Rupit dapat mengadaptasi materi ajar dan kurikulum untuk menciptakan ruang bagi siswa dalam memahami toleransi beragama secara lebih praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Fauzi (2021) dalam jurnal *"Fenomena Intoleransi dan Dampaknya terhadap Sikap Siswa di Sekolah"* menyatakan bahwa fenomena intoleransi di masyarakat mempengaruhi sikap siswa di sekolah. Walaupun kedua penelitian ini membahas faktor eksternal yang mempengaruhi sikap toleransi, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih dalam terhadap peran PKn dalam mengatasi fenomena intoleransi dan menciptakan pemahaman toleransi beragama di SMA Negeri 1 Muara Rupit. Penelitian ini memberikan penekanan pada peran PKn dalam menciptakan suasana yang mendukung pembentukan sikap toleransi yang lebih dalam, khususnya di lingkungan sekolah yang terpapar pada tantangan sosial yang lebih besar.

Kesimpulannya, meskipun ada kesamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya dalam hal peran PKn dalam membentuk sikap toleransi beragama, penelitian ini berbeda dalam hal konteks penelitian, yakni pada tingkat pendidikan SMA dengan karakteristik siswa yang lebih dewasa dan terlibat dalam dinamika sosial yang lebih kompleks, serta lingkungan sosial yang beragam.